



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien diperlukan klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis;
- b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses, dan penggunaan, serta penyusunan arsip;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Batang, maka perlu menyusun kebijakan tentang klasifikasi arsip yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
6. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam

- pengelolaan arsip dinamis;
- b. mewujudkan kode klasifikasi arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara kementerian dengan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
 - d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

BAB II KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan perangkat daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Mei 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Mei 2023

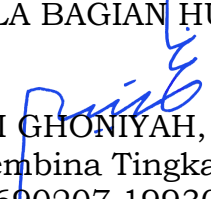
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

000	UMUM		
000.1	Ketatausahaan Dan Kerumahtanggaan		
	000.1.1	Telekomunikasi	
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
		000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri	
		000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)	
	000.1.5	Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi	
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas	
		000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
		000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
		000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	
		000.1.8.1	Pertamanan / Landscape
		000.1.8.2	Penghijauan
		000.1.8.3	Perbaikan Gedung
		000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
		000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
		000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
	000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	
		000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
		000.1.9.2	Pemasangan
	000.1.10	Ketertiban dan Keamanan	
		000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
		000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
	000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	
	000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	
000.2	Perlengkapan		
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan	
		000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor	
		000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
	000.2.3	Distribusi	
		000.2.3.1	Barang habis pakai
		000.2.3.2	Barang milik daerah

			000.2.3.2	Barang milik daerah
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan		
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah		
000.3	Pengadaan			
	000.3.1	Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)		
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)		
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)		
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)		
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa		
	000.3.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi		
000.4	Perpustakaan			
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka		
			000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
			000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
			000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
			000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
			000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
	000.4.3	Koleksi Pustaka		
			000.4.3.1	Pembelian
			000.4.3.2	Hibah
			000.4.3.3	Hadiah
			000.4.3.4	Tukar Menukar
			000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
			000.4.3.6	Terbitan Internal
			000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
			000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka		
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi		
	000.4.6	Layanan Perpustakaan		
			000.4.6.1	Keanggotaan
			000.4.6.2	Peminjaman
			000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan		
			000.4.7.1	MoU
			000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
			000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan		
			000.4.8.1	Pengembangan situs web
			000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
			000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
			000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital

	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan		
	000.4.10	Konservasi		
		000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	
		000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	
		000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)		
	000.4.12	Transformasi Digital		
	000.4.13	Kurasi Digital		
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan		
		000.4.14.1	Perpustakaan Umum	
		000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	
		000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	
		000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	
000.5	Kearsipan			
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan		
		000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	
		000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	
		000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	
		000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	
		000.5.2.5	Data Base Arsiparis	
		000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	
		000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	
		000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	
		000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	
		000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	
		000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis		
		000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	
		000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)	
		000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)	
		000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)	
		000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)	
	000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)		
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)		

	000.5.6	Penyusutan Arsip		
			000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
			000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan)
			000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)		
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis		
			000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
			000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis		
			000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)
			000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
			000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan ranskip)
			000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
			000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
			000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media))
			000.5.9.7	Preservasi Kuratif
			000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
			000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)		
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN		
	000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana		
	000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan		
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan		
			000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
			000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
			000.5.15.3	Sanksi
000.6	Persandian			

	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.6.2	Pengamanan persandian		
		000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	
		000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	
		000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi		
		000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	
		000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	
		000.6.3.3	Pelaksanaan	
		000.6.3.4	Pelaporan	
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian		
		000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	
		000.6.4.2	Jaring Komunikasi	
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik		
		000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	
		000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	
		000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	
		000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	
		000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	
		000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	
		000.6.5.7	Pelaporan	
000.7	Perencanaan Pembangunan			
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang		
		000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	
		000.7.1.2	Musrenbang Nasional	
		000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	
		000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	
		000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	
		000.7.1.6	Musrenbang Desa	
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah		
		000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	
		000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
		000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	
		000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	
		000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
		000.7.2.6	Program kerja tahunan	
		000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	
		000.7.2.8	Laporan Berkala	
		000.7.2.9	Laporan Insidental	
		000.7.2.10	Evaluasi Program	
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah		
		000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	
		000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	
		000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan		

			000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
			000.7.7.2	Pendanaan Daerah
			000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
			000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
			000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8	Organisasi dan Tata Laksana			
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
			000.8.1.1	Pembentukan
			000.8.1.2	Pengubahan
			000.8.1.3	Pembubaran
	000.8.2	Uraian Jabatan		
			000.8.2.1	Analisa Jabatan
			000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
	000.8.3	Ketatalaksanaan		
			000.8.3.1	Proses Bisnis
			000.8.3.2	Standar Pelayanan
			000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
			000.8.3.4	Pelayanan Publik
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional		
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan		
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi		
			000.8.6.1	Budaya Kerja
			000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
			000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan			
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah		
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi		
	000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan		
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan		
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
			000.9.6.1	Data
			000.9.6.2	Statistik
			000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
	000.9.7	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.8	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)		
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		
	000.9.10	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop		
100	PEMERINTAHAN			
100.1	Otonomi Daerah			
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)		
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		
			100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
			100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

			100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
			100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
			100.1.4.5	Assosiasi Daerah
	100.1.5	Otonomi khusus dan daerah istimewa		
	100.1.6	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		
			100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
			100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
	100.1.7	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		
100.2	Pemerintahan Umum			
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama		
			100.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
			100.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
			100.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
			100.2.4	Fasilitasi Kecamatan
			100.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
			100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
			100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
			100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
			100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	Hukum			
	100.3.1	Program Legislasi		
			100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
			100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan		
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah		
			100.3.3.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur
			100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
			100.3.3.3	Keputusan / Ketetapan Walikota
			100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
			100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
			100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
			100.3.3.7	Keputusan Kepala Perangkat Daerah
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran		
			100.3.4.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
			100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
			100.3.4.3	Instruksi / Surat Edaran Kota
			100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5	Surat Perintah		

			100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
			100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
			100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
			100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis		
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MOU)/Kontrak/ Perjanjian kerja sama		
			100.3.7.1	Dalam Negeri
			100.3.7.2	Luar Negeri
	100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)		
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum		
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)		
	100.3.11	Kasus/Sengketa Hukum		
			100.3.11.1	Pidana Kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
			100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
			100.3.11.3	Tata Usaha Negara
			100.3.11.4	Perburuhan
			100.3.11.5	Arbitrase
			100.3.11.6	Sengketa Adat
	100.3.12	Perijinan		
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)		
			100.3.13.1	Hak Cipta
			100.3.13.2	Hak Paten
			100.3.13.3	Hak Desain Industri
			100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
			100.3.13.5	Hak Merk
	100.3.14	Permohonan HAKI yang ditolak		
200	POLITIK			
200.1	Kesatuan Bangsa dan Politik			
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		
			200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
			200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
			200.1.2.3	Bela Negara
			200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
			200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional		
			200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
			200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
			200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
			200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
			200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan		
			200.1.4.1	Ketahanan Seni
			200.1.4.2	Ketahanan Budaya
			200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
			200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan

			200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
			200.1.4.6	Fasilitasi
			200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
			200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
			200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
			200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
			200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
	200.1.5	Politik Dalam Negeri		
			200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
			200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
			200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
			200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
			200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
			200.1.5.6	Pemerintah Daerah
			200.1.5.7	Database Parpol
			200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
			200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi		
			200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
			200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
			200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
			200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	Pemilu			
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih		
			200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
			200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
			200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
			200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
			200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		
			200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
			200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
			200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
			200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu		
			200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
			200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
			200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
			200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
			200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
	200.2.5	Pencalonan Pemilu		
			200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
			200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran

			200.2.5.3	Daftar bakal calon
			200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
			200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
			200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.6	Kampanye Pemilu		
			200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
			200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
			200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
	200.2.7	Dana Kampanye		
			200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
			200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
			200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara		
			200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
			200.2.8.2	Master surat suara
			200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
			200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
			200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu		
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu		
			200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
			200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
			200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu		
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
300.1	Satuan Polisi Pamong Praja			
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah		
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja		
		300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja	
		300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja		
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat		
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia		
300.2	Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan			
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan		
		300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	
		300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	
		300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	
		300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	
		300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	
		300.2.2.6	Registrasi BEACON	
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan		
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Masyarakat		
		300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	

			300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
			300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
			300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
			300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan		
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi		
	300.2.8	Operasi Komunikasi		
			300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
			300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
			300.2.8.3	Registrasi BEACON
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan		
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi		
	300.2.11	Pengembangan Sistem Informasi		
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi		
			300.2.12.1	Laporan Harian
			300.2.12.2	Laporan Bulanan
			300.2.12.3	Laporoan Tahunan
			300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT			
400.1	Pembangunan Daerah Tertinggal			
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya		
			400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
			400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
			400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
			400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
			400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur		
			400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
			400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
			400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha		
			400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
			400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
			400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
			400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha

			400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
			400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
			400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya		
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
			400.1.5.2	Penguatan kapasitas lembaga lokal
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus		
			400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
			400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
			400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
			400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
			400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum		
			400.2.2.1	Data gender
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)		
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
			400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
			400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)		
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
			400.2.4.2	Data perlindungan anak
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan		

		dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
		400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
		400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
		400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
		400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
		400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
		400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	
400.3	Pendidikan		
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Nonformal, Informal	
		400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
		400.3.2.2	Pelatihan Sosial
		400.3.2.3	Peringatan Hari anak
		400.3.2.4	Block Grant
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
		400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
		400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
		400.3.3.3	Pembinaan Program
		400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
		400.3.3.5	Pameran
		400.3.3.6	Rakor
		400.3.3.7	Sosialisasi
		400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
		400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
		400.3.5.2	Block Grant
		400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
		400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
		400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
		400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
		400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
		400.3.6.2	Block Grant
		400.3.6.3	Lomba, festival
		400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
		400.3.6.5	Pendataan
		400.3.6.6	Kelembagaan
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
		400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
		400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
		400.3.7.3	Sertifikasi Guru
		400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
		400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
		400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
		400.3.7.7	Block Grant
	400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
		400.3.8.1	Kurikulum

			400.3.8.2	Bahan Ajar
			400.3.8.3	Pelatihan
			400.3.8.4	Block grant
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
			400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
	400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus		
			400.3.9.1	Bahan ajar
			400.3.9.2	Petunjuk Teknis
			400.3.9.3	Block grant
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
			400.3.9.8	Pendataan
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
	400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik		
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.10.3	Setifikasi Guru
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
			400.3.10.7	Block grant
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.11	Penilaian Pendidikan		
			400.3.11.1	Penilaian Akademik
			400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
			400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
	400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan		
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
	400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan		
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4	Keolahragaan			
	400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan		
		400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	
		400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	
		400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi		
		400.4.3.1	Olahraga Massal	
		400.4.3.2	Olahraga Tradisional	
		400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata	
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga		
		400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	

			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus		
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional
			400.4.5.2	Layanan Khusus
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga		
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga		
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
			400.4.7.2	Kompetisi
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan		
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga		
			400.4.9.1	Industri Olahraga
			400.4.9.2	Promosi Olahraga
	400.4.10	Olahraga Prestasi		
			400.4.10.1	Daerah
			400.4.10.2	Nasional
			400.4.10.3	Internasional
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga		
			400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5	Kepemudaan			
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda		
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
			400.5.2.3	Pengembangan
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda		
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda		
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)		
			400.5.5.1	Pengkajian
			400.5.5.2	Pengembangan
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		
			400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
			400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
	400.5.7	Kewirausahaan		
			400.5.7.1	Kelembagaan

			400.5.7.2	Pengaderan
			400.5.7.3	Perintisan
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan		
			400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda		
			400.5.9.1	Standardisasi
			400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda		
			400.5.10.1	Kemitraan
			400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6	Kebudayaan			
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman		
			400.6.2.1	Registrasi Nasional
			400.6.2.2	Pelindungan
			400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
			400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman		
			400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
			400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
			400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
			400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya		
			400.6.4.1	Sejarah
			400.6.4.2	Pemetaan nilai
			400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
			400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
			400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
			400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya		
			400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
			400.6.5.2	Kekayaan budaya
			400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
			400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7	Kesehatan			
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar		
			400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
			400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
			400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
			400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
			400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
			400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
			400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
			400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
			400.7.2.9	Pembiayaan darah

			400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
			400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
			400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
			400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
			400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan		
			400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
			400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
			400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
			400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
			400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
			400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
			400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
			400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
			400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
			400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
	400.7.4	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya		
			400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
			400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
			400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
			400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
			400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan		
			400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
			400.7.5.2	Patologi dan toksilologi
			400.7.5.3	Radiologi
			400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
			400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
			400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
	400.7.6	Kesehatan Jiwa		
			400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
			400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
			400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
	400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra		
			400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
			400.7.7.2	Imunisasi
			400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
			400.7.7.4	Kesehatan matra
	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung		
			400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
			400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
			400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

			400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
			400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang		
			400.7.9.1	Pengendalian malaria
			400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
			400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
			400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
	400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular		
			400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
			400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
			400.7.10.3	Penyakit kanker
			400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
			400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
	400.7.11	Penyehatan lingkungan		
			400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
			400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
			400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
			400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
			400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
	400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan		
	400.7.13	Gizi		
			400.7.13.1	Gizi makro
			400.7.13.2	Gizi mikro
			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
	400.7.14	Kesehatan ibu		
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
			400.7.14.4	Keluarga berencana
			400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
	400.7.15	Kesehatan anak		
			400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
			400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
			400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
			400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
			400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
	400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer		
			400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
			400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
			400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
			400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
	400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga		
			400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
			400.7.17.2	Kapasitas kerja
			400.7.17.3	Lingkungan kerja
			400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
			400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga

	400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan		
			400.7.18.1	Harga obat publik
			400.7.18.2	Pengadaan obat
			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
	400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan		
			400.7.19.1	Alat kesehatan
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
	400.7.20	Kefarmasian		
			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
			400.7.20.2	Farmasi klinis
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
	400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian		
			400.7.21.1	Obat tradisional
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
	400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan		
			400.7.22.1	Surat keterangan
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
	400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan		
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
			400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
			400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
	400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan		
			400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
			400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
	400.7.25	Intelegensia Kesehatan		
			400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
			400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
	400.7.26	Kesehatan Haji		
			400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
			400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
	400.7.27	Promosi Kesehatan		
			400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
			400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
			400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
			400.7.27.4	Hari Kesehatan
	400.7.28	Data dan Informasi		
			400.7.28.1	Statistik kesehatan
			400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
			400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen		

			400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
			400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya		
			400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
			400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
			400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
			400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
			400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
	400.7.31	Rekam Medis		
400.8	Agama dan Kepercayaan			
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.8.2	Fasilitasi		
			400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
			400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
			400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
			400.8.2.4	Kasus Keagamaan
			400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME		
			400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
			400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
			400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
			400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
			400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	Sosial			
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak		
			400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
			400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
			400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
			400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
			400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial		
			400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
			400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
			400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial		
			400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
			400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
			400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
			400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA		
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia		

			400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
			400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
			400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial		
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial		
			400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
			400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
			400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam		
			400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
			400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
			400.9.10.4	Kerjasama
	400.9.11	Jaminan Sosial		
			400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
			400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
			400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
			400.9.11.4	Kerjasama
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial		
			400.9.12.1	Ketahanan keluarga
			400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
			400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
			400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
			400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil		
			400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
			400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
			400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
			400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
			400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan		
			400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
			400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
			400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
			400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
			400.9.14.5	Bantuan Langsung
			400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial		
			400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
			400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
			400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
			400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10	Pemberdayaan Masyarakat Desa			

	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	
	400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		400.10.4.1	Budaya Nusantara	
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat		
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	
		400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan		
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	
		400.10.6.5	Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)		
400.11	Pertamanan dan Pemakaman			
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.11.2	Pertamanan		
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	
		400.11.2.2	Taman Kota	
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	
	400.11.3	Pemakaman		
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	
		400.11.3.2	Pemakaman	
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	
	400.11.4	Jalur Hijau		
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat		
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan		
	400.11.7	Pengelolaan Data		

	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan		
400.12	Kependudukan dan Catatan Sipil			
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.		
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk		
		400.12.2.1	Identitas Penduduk	
		400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	
		400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	
		400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	
		400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.3	Pencatatan Sipil		
		400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	
		400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	
		400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	
		400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	
		400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan		
		400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	
		400.12.5.2	Kualitas Penduduk	
		400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	
		400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	
		400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Pengembangan Wawasan Evaluasi	
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan		
		400.12.6.1	Indikator Kependudukan	
		400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	
		400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	
		400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	
		400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	
400.13	Keluarga Berencana			
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk		
		400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	
		400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk		
		400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	
		400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk		
		400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	
		400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk		
		400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	
		400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	

	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
		400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
		400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
	400.13.7	Pengembangan Sistem	
		400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
		400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.8	Pengembangan Materi	
		400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
		400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
		400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
		400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.10	Analisis Sosial	
	400.13.11	Analisis Ekonomi	
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
	400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
		400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
		400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
		400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
		400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.0	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	
		400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
		400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.1	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
		400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
		400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.2	Kesertaan keluarga berencana pria	
		400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
		400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
	400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	
	400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	
	400.13.26	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak	
		400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
		400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
	400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	
		400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
		400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

	400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja	
		400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
		400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
	400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	
		400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
		400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
	400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
		400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
		400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
	400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
		400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
		400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	
	400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	
	400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	
		400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
		400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	
	400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
		400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
		400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
		400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.41	Advokasi dan pencitraan	
	400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
		400.13.42.1	Promosi
		400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
		400.13.42.3	Produk media komunikasi
	400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	
	400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	
		400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
		400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
		400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

			400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.46	Tenaga Lini Lapangan		
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
	400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan		
			400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
			400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
	400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan		
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan		
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data		
	400.13.51	Analisis dan evaluasi		
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data		
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data
	400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi		
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi		
			400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.14	Hubungan Masyarakat			
	400.14.1	Keprotokolan		
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat		
	400.14.3	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/video/rekaman suara/multi media		
	400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan		
			400.14.4.1	Kliping koran
			400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster/plakat
			400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah		
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
			400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
			400.14.5.5	Forum Kehumasan

			400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD		
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten		
	400.14.8	Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal		
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik		
	400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan		
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan		
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf		
500	PEREKONOMIAN			
500.1	Ketahanan Pangan			
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah		
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		
		500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	
		500.1.2.2	Akses Pangan	
		500.1.2.3	Kerawanan Pangan	
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan		
		500.1.3.1	Distribusi Pangan	
		500.1.3.2	Harga Pangan	
		500.1.3.3	Cadangan Pangan	
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan		
		500.1.4.1	Konsumsi Pangan	
		500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	
		500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan		
		500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	
		500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan	
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)		
	500.1.7	Bimbingan Teknis		
	500.1.8	Evaluasi		
500.2	Perdagangan			
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri		
		500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	
		500.2.2.2	Bina Usaha Jasa Perdagangan	
		500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	
		500.2.2.4	Informasi Perusahaan	
		500.2.2.5	Pelaku Pasar	
		500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	
		500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	
		500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	
		500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	
		500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	
		500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	
		500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	
		500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	
		500.2.2.14	Informasi Pasar	
		500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	
		500.2.2.16	Barang Strategis	
		500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		

			500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
			500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
			500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
			500.2.3.4	Tata usaha
			500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
			500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
			500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
			500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
			500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
			500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
			500.2.3.11	Jasa
			500.2.3.12	Kerjasama
			500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
			500.2.3.14	Kelembagaan dan penilaian
			500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
			500.2.3.16	Pengawasan
			500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
			500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi		
			500.2.4.1	Pengkajian pasar
			500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
			500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
			500.2.4.4	Pengkajian pasar
			500.2.4.5	Pengembangan Pasar
			500.2.4.6	Sistem informasi
			500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
			500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
			500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
	500.2.5	Bimbingan Teknis		
	500.2.6	Evaluasi		
500.3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM		
			500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
			500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
			500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
			500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi		
			500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
			500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
			500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
			500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4	Pembiayaan		
			500.3.4.1	Program Pendanaan
			500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
			500.3.4.3	Urusan Permodalan
			500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
			500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
			500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha		

			500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
			500.3.5.2	Ekspor dan Impor
			500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
			500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
			500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
			500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
			500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
			500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
			500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
			500.3.6.5	Advokasi
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha		
			500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
			500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
			500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
			500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
			500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK		
			500.3.8.1	Penelitian Koperasi
			500.3.8.2	Penelitian UKM
			500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
			500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga		
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)		
			500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
			500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
	500.3.11	Monitoring dan Evaluasi		
500.4	Kehutanan			
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.4.2	Penyuluhan		
			500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
			500.4.2.2	Materi Penyuluhan
			500.4.2.3	Program Penyuluhan
			500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
			500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
			500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
			500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
			500.4.2.8	Deseminasi
			500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
	500.4.3	Planologi Kehutanan		
			500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
			500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
			500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
			500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan
			500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
			500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
			500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
			500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
			500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
			500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
			500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan

			500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
			500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
			500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	500.4.4	Bina Usaha Kehutanan		
			500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
			500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.3	Kerjasama
			500.4.4.4	Pembatalan/ Penolakan
			500.4.4.5	Perpanjangan
			500.4.4.6	Modal dan Peralatan
			500.4.4.7	Investasi Industri
			500.4.4.8	Peralatan
			500.4.4.9	Tenaga Kerja
			500.4.4.10	Pemegang Saham
			500.4.4.11	Neraca Perusahaan
			500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
			500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
			500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
			500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
			500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
			500.4.4.17	Produksi Kayu
			500.4.4.18	Produksi non kayu
			500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.21	Industri Non Kayu
			500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
			500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
			500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
			500.4.4.25	Pemblokiran
			500.4.4.26	Denda
			500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
			500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
			500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
			500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
			500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
			500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
			500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
			500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
			500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
			500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
			500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
			500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
			500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
			500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan

			500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
			500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
			500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
			500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
			500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
			500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
	500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan		
			500.4.5.1	Standardisasi
			500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
			500.4.5.3	Pengembangan
			500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
			500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
			500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
			500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
			500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
			500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
	500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam		
			500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
			500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
			500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
			500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
			500.4.6.5	Kawasan Konservasi
			500.4.6.6	Pengamanan Hutan
			500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
			500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
			500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
			500.4.6.11	Bina Cinta Alam
			500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
			500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
	500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial		
			500.4.7.1	Pengelolaan Benih
			500.4.7.2	Kebun Benih
			500.4.7.3	Tegakan Benih
			500.4.7.4	Pengadaan Benih
			500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
			500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
			500.4.7.7	Pembibitan
			500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
			500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
			500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
			500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
			500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			500.4.7.14	Perhutanan Sosial

			500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
	500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		
			500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
			500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
			500.4.8.3	Diseminasi
			500.4.8.4	Gelar Teknologi
			500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	Kelautan dan Perikanan			
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.5.2	Perikanan Tangkap		
			500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
			500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
			500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
			500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
			500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
			500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
			500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
			500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
			500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
			500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
			500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
			500.5.2.14	Kenelayanan
			500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
			500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.3	Perikanan Budidaya		
			500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
			500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
			500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
			500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
			500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan
			500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
			500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
			500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
			500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
			500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
			500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
			500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
			500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
			500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
			500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
			500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
			500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
			500.5.4.2	Pengembangan Produk
			500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			500.5.4.4	Industri Pengolahan
			500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
			500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi

			500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
			500.5.4.8	Pengembangan Industri
			500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
			500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
			500.5.4.18	Pengembangan Impor
			500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.20	Pelayanan Usaha
			500.5.4.21	Kemitraan Usaha
			500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
			500.5.4.24	Informasi dan Promosi
	500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		
			500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
			500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
			500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
			500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
			500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
			500.5.5.6	Konservasi Wawasan
			500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
			500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
			500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
			500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
			500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
			500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
			500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.17	Akses Permodalan
			500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
			500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
			500.5.5.20	Pengembangan Usaha
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
			500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
			500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
			500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
			500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
			500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
			500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya

				NonHayati
			500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
			500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
			500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
			500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
			500.5.6.13	Sistem Pemantauan
			500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
			500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
			500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
			500.5.6.17	Penyidikan
			500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
			500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
			500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.7	Karantina Ikan		
			500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
			500.5.7.2	Penahanan
			500.5.7.3	Pengasingan
			500.5.7.4	Pengamatan
			500.5.7.5	Pengakuan
			500.5.7.6	Penolakan
			500.5.7.7	Pemusnahan
			500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
			500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
			500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
			500.5.7.11	Pemasukan Formulir
			500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
			500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
			500.5.7.14	Surat Perintah
			500.5.7.15	Rekomendasi
			500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
			500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
			500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
			500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
			500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
			500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	Pertanian			
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.6.2	Perlindungan hortikultura		
		500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	
		500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	
		500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	
		500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura		
		500.6.3.1	Penilaian Varietas	
		500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	
		500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan		
		500.6.4.1	Basis Data Lahan	
		500.6.4.2	Pengendalian Lahan	
		500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	
		500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	

			500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi		
			500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
			500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimalisasi Air
			500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
			500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian		
			500.6.6.1	Pembiayaan Program
			500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
			500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
			500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
	500.6.7	Pupuk Pestisida		
			500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
			500.6.7.2	Pupuk Anorganik
			500.6.7.3	Pestisida
			500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian		
			500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan		
			500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
			500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
			500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
			500.6.9.4	Kelembagaan Benih
	500.6.10	Budidaya Serealia		
			500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
			500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
			500.6.10.3	Jagung
			500.6.10.4	Serealia Lain
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi		
			500.6.11.1	Kedelai
			500.6.11.2	Ubi Kayu
			500.6.11.3	Aneka Kacang
			500.6.11.4	Aneka Umbi
	500.6.12	Tanaman Pangan		
			500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
			500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan		
			500.6.13.1	Padi
			500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain
			500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
			500.6.13.4	Aneka Umbi
	500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian		
			500.6.14.1	Tanaman Pangan
			500.6.14.2	Hortikultura
			500.6.14.3	Perkebunan
			500.6.14.4	Peternakan

	500.6.15	Mutu dan Standarasi	
		500.6.15.1	Standardisasi
		500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
		500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
		500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
	500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
		500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
		500.6.16.2	Investasi
		500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
		500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
	500.6.17	Pemasaran Domestik	
		500.6.17.1	Informasi Pasar
		500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
		500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
		500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
	500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	
	500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
		500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
		500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
	500.6.20	Diseminasi	
	500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian	
		500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
		500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
	500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
	500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
	500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
	500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
		500.6.26.1	Hak Cipta
		500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
		500.6.26.3	Hak Paten Biasa
		500.6.26.4	Hak Merek
		500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
		500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
		500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
	500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
		500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
		500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
		500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
	500.6.28	Pelayanan Hukum	
		500.6.28.1	Sertifikasi
		500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
	500.6.29	Karantina Pertanian	
		500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
		500.6.29.2	Karantina Hewan
	500.6.30	Bimbingan Teknis	

	500.6.31	Evaluasi		
500.7	Peternakan			
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan		
			500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
			500.7.2.2	Pakan Ternak
			500.7.2.3	Budidaya Ternak
			500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
			500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
	500.7.3	Bimbingan Teknis		
	500.7.4	Evaluasi		
500.8	Perkebunan			
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.8.2	Tanaman Semusim		
			500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
			500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
			500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
			500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar		
			500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
			500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
			500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
			500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.4	Tanaman Tahunan		
			500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
			500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
			500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
			500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan		
			500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
			500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
			500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
			500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha		
			500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

			500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
			500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
			500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan		
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan		
500.9	Perindustrian			
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama		
			500.9.2.1	Industri Manufaktur
			500.9.2.2	Industri Agro
			500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.3	Promosi Industri		
			500.9.3.1	Industri Manufaktur
			500.9.3.2	Promosi Industri Agro
			500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi		
			500.9.4.1	Industri Manufaktur
			500.9.4.2	Industri Agro
			500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual		
			500.9.5.1	Industri Manufaktur
			500.9.5.2	Industri Agro
			500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.6	Industri Hijau		
			500.9.6.1	Industri Manufaktur
			500.9.6.2	Industri Agro
			500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota		
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		
	500.9.12	Standarisasi		
			500.9.12.1	Standar
			500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
			500.9.12.3	Infrastruktur Standar
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri		
			500.9.13.1	Kebijakan Industri
			500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
			500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup		
			500.9.14.1	Industri Hijau
			500.9.14.2	Lingkungan Hidup
			500.9.14.3	Energi
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual		
			500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri

			500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
			500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		
500.10	Energi dan Sumber Daya Mineral			
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian		
			500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
			500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.2.3	Pertambangan
			500.10.2.4	Panas Bumi
			500.10.2.5	Geosains
			500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
			500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
	500.10.3	Penelitian Kegeologian		
			500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
			500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
			500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
			500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
			500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
			500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
			500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.10.3.9	Survei Geologi
	500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian		
			500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
			500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.4.4	Survei Geologi
			500.10.4.5	Konservasi
	500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi		
			500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
			500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
			500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
			500.10.5.4	Survei Geologi
	500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi		
			500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
			500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
			500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
			500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
			500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
			500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
			500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
			500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi		
			500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
			500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain:

				Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
			500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
			500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
			500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
			500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
			500.10.7.7	Partisipasi Interest
			500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
	500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi		
			500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
			500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
			500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan		
			500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
			500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
			500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)
			500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
			500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
			500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
			500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
			500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan

				Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
			500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urut Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
			500.10.9.10	Usaha penunjang
	500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		
			500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi		
			500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
			500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
			500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
			500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
			500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
			500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
			500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
	500.10.12	Panas Bumi		
			500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
			500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
			500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
			500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
			500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
			500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
			500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
			500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
			500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
			500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
			500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
			500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
			500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
			500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
			500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
			500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
			500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
	500.10.13	Bioenergi		
			500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
			500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
			500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor

			500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
			500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
			500.10.13.6	Database Perusahaan Bioenergi
			500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
			500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
			500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.14	Aneka Energi		
			500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
			500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
			500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
			500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
			500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.15	Konservasi Energi		
			500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
			500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
			500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
			500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
			500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
			500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
			500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
			500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
			500.10.15.9	Investment Grade Audit (IGA)
			500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
	500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE		
			500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
			500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
			500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
			500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
	500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik		
			500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
			500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
			500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
	500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan		
			500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
			500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik

			500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
			500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan		
			500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
			500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
			500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
			500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
	500.10.20	Sertifikasi		
			500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
			500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
			500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
			500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
			500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
	500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan		
	500.10.22	Standarisasi Kompetensi		
	500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan		
			500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
			500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan		
			500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
			500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
			500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
			500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
			500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
	500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara		
			500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
			500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
			500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
			500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
			500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara

			500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
			500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
			500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
			500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
	500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral		
			500.10.26.1	Ketenagakerjaan
			500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
			500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
			500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
			500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
			500.10.26.12	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
			500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
			500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
			500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
			500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
	500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara		
			500.10.27.1	Ketenagakerjaan
			500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
			500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
			500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
			500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
			500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
			500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
			500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan

				rancangan akhir
			500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
			500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
	500.10.28	Penerimaan Negara		
			500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
			500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara		
			500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
			500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
			500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
			500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
			500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
			500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
			500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
			500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
			500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
			500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
			500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
			500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
			500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
			500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
			500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
			500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
			500.10.29.17	Pengawasan Teknis
			500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
			500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
	500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan		
			500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
			500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi

			500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi
			500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
			500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
			500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
			500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
	500.10.31	Sarana Litbang		
			500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
			500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
	500.10.32	Afiliasi		
			500.10.32.1	Proyek Percontohan
			500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
			500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
			500.10.32.4	Penyajian Informasi
	500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian		
			500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
			500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
			500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
			500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
	500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi		
			500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
			500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
			500.10.34.3	Laboratorium
			500.10.34.4	Study
			500.10.34.5	Teknologi Proses
			500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
			500.10.34.7	Teknologi Gas
	500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara		
			500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
			500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
			500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
	500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan		
			500.10.36.1	Energi baru terbarukan
			500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
			500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
			500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11	Perhubungan		
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
		500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
		500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
		500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
		500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
		500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
		500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
		500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
		500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
		500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
		500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
		500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
		500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
		500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
		500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
		500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
		500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
		500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
		500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
		500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
		500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
		500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
	500.11.7	Perlengkapan Jalan	
		500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
		500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
		500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
		500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
		500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
	500.11.8	Angkutan Penumpang	
		500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
		500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
		500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
		500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
		500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
		500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
		500.11.8.7	Angkutan perintis
		500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum

	500.11.9	Angkutan Barang		
			500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.11.9.2	Tarif angkutan barang
			500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
			500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
			500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
	500.11.10	Monitoring Operasional		
			500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
			500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
	500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
			500.11.11.1	Pedoman Teknis
			500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.11.11.3	Bimtek PPNS
			500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan		
			500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
			500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
	500.11.13	Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan		
			500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
			500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		
	500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		
			500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		
			500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
			500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
			500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan		
	500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan		
			500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
			500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
			500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

	500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.19.1	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
		500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
		500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
	500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
		500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
		500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
		500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
		500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
		500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
	500.11.24	Angkutan Perkotaan	
		500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
		500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
		500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
		500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
		500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
		500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
		500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
		500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
		500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
		500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
		500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
	500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
		500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
		500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian

			500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.28	Pengembangan Keselamatan		
			500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
			500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
	500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan		
			500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum		
			500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
			500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
	500.11.31	Audit Keselamatan		
			500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
			500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.32	Inspeksi Keselamatan		
			500.11.32.1	Pedoman keselamatan
			500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.33	Parkir		
			500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
			500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
			500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12	Komunikasi dan Informatika			
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.12.2	Telekomunikasi		
			500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
			500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
			500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
			500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3	Penyiaran		
			500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
			500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal		
			500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
			500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
			500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
			500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
			500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
	500.12.5	Pengendalian Informatika		
			500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi

			500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
			500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
			500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
	500.12.6	e- Government		
			500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
			500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
			500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government
			500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan
			500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
	500.12.7	e- Business		
			500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
			500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
			500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business
			500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat		
			500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
			500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika		
			500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
			500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
			500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
			500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
	500.12.10	Keamanan Informasi		
			500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
			500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
			500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
			500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
			500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
	500.12.11	Komunikasi Publik		
			500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
			500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
			500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
	500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi		
			500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
			500.12.12.2	Informasi Perekonomian
			500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
	500.12.13	Pengelolaan Media Publik		
			500.12.13.1	Media Cetak
			500.12.13.2	Media Online
			500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
	500.12.14	Kemitraan Komunikasi		
			500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
			500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
			500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
	500.12.15	Infrastruktur Informatika		
			500.12.15.1	Jaringan
			500.12.15.2	Peranti Teknologi Informatika
			500.12.15.3	Keamanan Informatika
	500.12.16	Sistem dan Data		
			500.12.16.1	Portal dan Konten

			500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
			500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
	500.12.17	Pusat Kerjasama		
			500.12.17.1	Kerja Sama daerah
			500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
	500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat		
			500.12.18.1	Pelayanan Informasi
			500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
			500.12.18.3	Bimbingan Teknis
	500.12.19	Evaluasi		
500.13	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata		
			500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
			500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
			500.13.2.3	Industri Pariwisata
			500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
			500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata		
			500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
			500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
			500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
			500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya		
			500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
			500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
			500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK		
			500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
			500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
			500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
			500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
			500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
			500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	Statistik			
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi		
			500.14.2.1	Perencanaan
			500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern),

				Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
			500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
			500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
			500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
	500.14.3	Survei		
			500.14.3.1	Perencanaan
			500.14.3.2	Persiapan
			500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
			500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
			500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
	500.14.4	Konsolidasi Data Statistik		
			500.14.4.1	Kompilasi Data
			500.14.4.2	Analisis data
			500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik		
500.15	Ketenagakerjaan			
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja		
		500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
		500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi		
		500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	
		500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
		500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	
		500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	
		500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja		
		500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	
		500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	
		500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan	
		500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan		
		500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	
		500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	

			500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
			500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
	500.15.6	Bina Pemagangan		
			500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
			500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
			500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
			500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan		
			500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
			500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
			500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja		
			500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
			500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
			500.15.8.3	Bursa Kerja
			500.15.8.4	Analisis Jabatan
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		
			500.15.9.1	Antar Kerja
			500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
			500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
			500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal		
			500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
			500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
			500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
			500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.11	Standardisasi Profesi		
			500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
			500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
	500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi		
			500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
			500.15.12.2	Perjanjian Kerja
			500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
			500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
	500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial		
			500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
			500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
			500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
	500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
			500.15.14.1	Pengupahan
			500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
	500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial		
			500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
			500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja

			500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
			500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
	500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak		
			500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
			500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
			500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
			500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
			500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
			500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
			500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
			500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
			500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
	500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan		
	500.15.20	Bina Penegakan Hukum		
			500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
	500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
			500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
			500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
			500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
			500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
	500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3		
			500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16	Penanaman Modal			
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal		
			500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
			500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
			500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
			500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
			500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
			500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
			500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha

			500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
			500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
			500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal		
			500.16.4.1	Pengembangan Promosi
			500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
			500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
			500.16.4.4	Promosi Sektoral
			500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
			500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal		
			500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
			500.16.5.2	Kerja Sama Regional
			500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
			500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
			500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
			500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
			500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
			500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
			500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal		
			500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
			500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
			500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
			500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
			500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
500.17	Pertanahan			
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan		
			500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
			500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
			500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
			500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah		
			500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
			500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
			500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
	500.17.4	Sengketa Tanah		
			500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
			500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian
500.18	Transmigrasi			
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi		
			500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
			500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
			500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
			500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi		
			500.18.3.1	Penyiapan Lahan

			500.18.3.2	Penyiapan Sarana
			500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
			500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
	500.18.4	Fasilitas Penempatan Transmigrasi		
			500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
			500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
			500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
			500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat		
			500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
			500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
			500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
			500.18.5.4	Pelayanan Investasi
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		
			500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
			500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
			500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
			500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
			500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
	500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat		
			500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
			500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
			500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
			500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
	500.18.8	Pengembangan Usaha		
			500.18.8.1	Kewirausahaan
			500.18.8.2	Produksi
			500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
			500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan		
			500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
			500.18.9.2	Pengembangan Sarana
			500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
			500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan		
			500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
			500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
			500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
			500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
600.1	Pekerjaan Umum			
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air		
			600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
			600.1.2.2	Kelembagaan
			600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
			600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
			600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air		
			600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
			600.1.3.2	Manajemen Mutu

			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air		
			600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
			600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
			600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		
			600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
			600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
			600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
			600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
			600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)		
			600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
			600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan		
			600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
			600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
	600.1.8	Pembangunan Jalan		
			600.1.8.1	Standar dan Pedoman
			600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
			600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
			600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
	600.1.9	Preservasi Jalan		
			600.1.9.1	Standar dan Pedoman
			600.1.9.2	Perencanaan Teknis
			600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
			600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
	600.1.10	Pengelolaan Jembatan		
			600.1.10.1	Standar dan Pedoman
			600.1.10.2	Perencanaan Teknis
			600.1.10.3	Teknik Jembatan
			600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
	600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah		
			600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
			600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
			600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol		
			600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
			600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
			600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
			600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman		
			600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan

			600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman		
			600.1.14.1	Perencanaan Teknis
			600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
			600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
			600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
			600.1.14.5	Kelembagaan
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan		
			600.1.15.1	Perencanaan Teknis
			600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
			600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
			600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
			600.1.15.5	Kelembagaan
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
			600.1.16.1	Perencanaan Teknis
			600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
			600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
			600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
			600.1.16.5	Kelembagaan
			600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
			600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
	600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman		
			600.1.17.1	Perencanaan Teknis
			600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
			600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
			600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
			600.1.17.5	Kelembagaan
			600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
	600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi		
600.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan		
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
			600.2.2.3	Kemitraan
	600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan		
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
	600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan		
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
	600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan		
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.5.2	Analisa Teknik
			600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian

		600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
	600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
		600.2.6.1	Perencanaan Teknik
		600.2.6.2	Penyediaan
		600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
		600.2.6.4	Pengelolaan
	600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
		600.2.7.1	Perencanaan Teknik
		600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
		600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
		600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
		600.2.7.5	Perencanaan Teknik
		600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
		600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
		600.2.8.1	Perencanaan Teknik
		600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
		600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
		600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
	600.2.9	Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
		600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
		600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
		600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
		600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
		600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
		600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
		600.2.10.4	Manajemen Mutu
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
		600.2.11.1	Kelembagaan
		600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
		600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
		600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
		600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
		600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
		600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
		600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
		600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
		600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
		600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
		600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
		600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
		600.2.15.2	Pengembangan Materi
		600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	

			600.2.16.1	Antar Sektor
			600.2.16.2	Antar Wilayah
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis		
			600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
			600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan		
			600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
			600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
			600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
			600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
			600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi		
600.3	Tata Ruang (Tata Kota)			
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah		
	600.3.2	Perencanaan		
			600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
			600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
			600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
			600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
			600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
			600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
			600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian		
			600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
			600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
			600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.4	Pemetaan		
			600.3.4.1	Peta Dasar
			600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
			600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
			600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	Lingkungan Hidup			
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
			600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
			600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor		
			600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
			600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan		
	600.4.5	Dampak Lingkungan		
			600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
			600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
			600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan		
			600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
			600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil

			600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan		
			600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
			600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
			600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
			600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan		
			600.4.8.1	Pengembangan
			600.4.8.2	Pemanfaatan
			600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
			600.4.8.4	Keamanan Hayati
			600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat		
			600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
			600.4.9.2	Rawa
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer		
			600.4.10.1	Perangkat mitigasi
			600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
			600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
			600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim		
			600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
			600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
	600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun		
			600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
			600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
			600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun		
			600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
			600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
			600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
			600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
	600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3		
			600.4.14.1	Pemantauan
			600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
	600.4.15	Pengelolaan Sampah		
			600.4.15.1	Pembatasan sampah
			600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
			600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
			600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan		
			600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
			600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan		
			600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
			600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
	600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan		
			600.4.18.1	Penyidikan
			600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut

			600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan		
			600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
			600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat		
			600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
			600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat		
			600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
			600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan		
			600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
			600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan		
			600.4.23.1	Pengelolaan Data
			600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
			600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
			600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan		
			600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
			600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi		
			600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
			600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
			600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan		
			600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
			600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN			
700.1	Pengawasan Internal			
	700.1.1	Rencana Pengawasan		
			700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
			700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
			700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
			700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
			700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan		
			700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan

				Laporan Keuangan dan Review
			700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN			
800.1	Sumber Daya Manusia			
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara		
		800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan	
		800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	
		800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
		800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai		
		800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	
		800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	
		800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	
		800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	
		800.1.2.5	Pangkatan ASN	
		800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	
		800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	
		800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	
	800.1.3	Mutasi Pegawai		
		800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	
		800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	
		800.1.3.3	Pangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	
		800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	
		800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	
		800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	
	800.1.4	Pengembangan Karir		
		800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/ Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	
		800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	
		800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	
		800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	
		800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara		
		800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	
		800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	
		800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	

	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
		800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
		800.1.6.2	Disiplin
		800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
		800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
		800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
		800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
	800.1.7	Bantuan Hukum	
	800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
		800.1.8.1	Status Kepegawaian
		800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
		800.1.8.3	Keberatan Pegawai
		800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
	800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
		800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
		800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
		800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
		800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
	800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
		800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
		800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
		800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
		800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
		800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
		800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honororer
	800.1.11	Administrasi Pegawai	
		800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
		800.1.11.2	Cuti Sakit
		800.1.11.3	Cuti Bersalin
		800.1.11.4	Cuti Tahunan
		800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
		800.1.11.6	Cuti Besar
		800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
		800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
		800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
		800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
		800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
		800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
		800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
		800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
		800.1.12.3	Tabungan Perumahan
		800.1.12.4	Bantuan Sosial
		800.1.12.5	Pakaian Dinas
		800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
		800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih

			800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
			800.1.12.10	Rekam Medis
	800.1.13	Administrasi Perseorangan		
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
			800.1.13.4	Sekretaris Daerah
			800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14	Penilaian Kompetensi		
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	Pendidikan dan Pelatihan			
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan		
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
			800.2.2.4	Modul-modul diklat
			800.2.2.5	Panduan fasilitator
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3	Widyaiswara		
			800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat		
			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
			800.2.4.5	Sistem informasi diklat
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5	Alumni		
900	KEUANGAN			
900.1	Keuangan Daerah			
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)		
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
			900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan

			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
	900.1.2	Penyusunan Anggaran		
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran		
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
			900.1.3.2	Pendapatan
			900.1.3.3	Belanja
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
			900.1.3.7	Daftar Gaji
			900.1.3.8	Kartu Gaji
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
			900.1.3.10	Laporan Keuangan
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri		
			900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
			900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
			900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
			900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
			900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
			900.1.4.10	Staff Appraisal Report
			900.1.4.11	Report/Laporan
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
			900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
			900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)		
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)		
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
			900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran

	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan		
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
			900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
			900.1.7.3	Buku Rekening Bank
			900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
			900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan		
			900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
			900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD		
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu		
			900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
			900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
			900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
			900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah		
			900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
			900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
			900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
			900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
	900.1.12	Anggaran Daerah		
			900.1.12.1	Anggaran Daerah
			900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah

	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah		
			900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
			900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
			900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
			900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
			900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan		
			900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
			900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
			900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
			900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi

			900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
	900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah		
			900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI